

Evaluasi Ruang Publik Taman Film Kota Bandung dengan Model Context Input, Process, Product (CIPP)

Evaluation of the Public Space at Bandung City Film Park
Using the Context, Input, Process, Product (CIPP) Model

Alif Nur Ramandha^{1*}, Ade Firmansyah¹, Andi Muhammad Ahsan¹

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Pradita, Indonesia

*Korespondensi: alif.nur@student.pradita.ac.id

Diterima: 07/08/2025

Disetujui: 30/08/2026

Tersedia Online: 31/08/2026

DOI: [10.14710/tataloka.28.3.171-188](https://doi.org/10.14710/tataloka.28.3.171-188)

Abstrak: Ruang terbuka publik memegang peranan penting dalam menciptakan kualitas lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat perkotaan. Dalam konteks Kota Bandung, ruang terbuka publik menjadi elemen strategis untuk merespons kebutuhan akan ruang bersama yang inklusif, mudah dijangkau, dan adaptif terhadap dinamika kota. Namun, tidak sedikit ruang publik yang mengalami ketidaksesuaian antara perencanaan dan pemanfaatannya. Salah satu contohnya adalah Taman Film, ruang terbuka publik tematik yang dibangun di bawah kolong Jalan Layang Pasupati. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan dan permasalahan Taman Film menggunakan pendekatan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun taman ini memiliki konsep tematik yang unik, fungsi utamanya sebagai ruang pemutaran film tidak berjalan optimal sejak tahun 2017. Selain itu, pengelolaan yang pasif, kurangnya integrasi spasial dengan jaringan kota, serta minimnya partisipasi komunitas menyebabkan taman kehilangan arah fungsional. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa keberhasilan ruang terbuka publik tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kesinambungan pengelolaan dan relevansi sosial ruang tersebut. Rekomendasi diarahkan pada strategi pengelolaan kolaboratif, revitalisasi fasilitas, dan penyesuaian fungsi taman dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Model Evaluasi, CIPP, Ruang Terbuka Publik, Taman Film, Kota Bandung

Abstract: Public open spaces play a vital role in shaping the environmental and social quality of urban life. In the context of Bandung City, public spaces are strategic elements to support inclusive, accessible, and adaptive urban development. However, many public spaces fail to align with the needs of their users. One such example is Taman Film, a thematic public space built beneath the Pasupati Flyover. This study aims to evaluate the park's success and challenges using the CIPP (Context, Input, Process, Product) model. A descriptive qualitative approach was applied, involving field observations, interviews, and literature review. The findings reveal that although the park has a unique thematic concept, its main function as an open-air cinema has not operated since 2017. In addition, poor management, limited spatial integration, and lack of community engagement have contributed to its functional decline. The study concludes that the success of public open spaces depends not only on their physical infrastructure but also on long-term management and social relevance. Recommendations focus on collaborative management strategies, facility revitalization, and aligning the park's functions with community needs.

Keywords: Evaluation Model, CIPP, Public Open Space, Taman Film, Bandung City

PENDAHULUAN

Ruang terbuka publik adalah salah satu elemen penting di dalam struktur perkotaan sebagai ruang ekologis. Selain itu Menurut Steiner & Butler (2007), ruang terbuka publik juga didefinisikan sebagai taman dan ruang terbuka yang memiliki rancangan yang sistematis untuk memberikan layanan kepada suatu komunitas. Studi kategori taman di Shanghai menemukan bahwa taman yang temanya ditetapkan tanpa membaca permintaan penggunaannya cenderung berhenti berfungsi (Peng & Yin, 2025). Dalam konteks komunitas, ruang publik perkotaan juga harus didorong permintaan lokal yang menjadi penggunaannya (Wang et al., 2025).

Keberadaan ruang terbuka publik menjadi sangat krusial dalam merespon kebutuhan terhadap ruang bersama dalam konteks perkembangan perkotaan seperti Kota Bandung. Huat dan Edwards (1992) dalam Manurung (2018) menyatakan, “secara konseptual, semua ruang publik dirancang, membawa jejak campur tangan manusia dalam penciptaan batas batas yang mendefinisikan ruang, yang terjadi secara alami ruang berada di luar definisi sosial”. Dalam hal ini menciptakan ruang bersama yang inklusif, mudah dijangkau dan adaptif terhadap dinamika sosial budaya masyarakat perkotaan perlu menjadi sorotan penting dalam merespon geliatnya urbanisasi. Pemerintah Kota Bandung telah melakukan upaya dalam merespon kebutuhan ruang terbuka publik di perkotaan dengan mendorong pembangunan dan revitalisasi di berbagai taman kota. Hal ini juga merupakan salah satu strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ruang sosial masyarakat.

Namun demikian, ruang terbuka publik yang difungsikan sebagai taman seringkali dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial dan pengguna Lefebvre et al. (2009) berpendapat bahwa pembangunan ruang perkotaan sarat dengan dinamika perubahan menuju modernitas, namun pada dasarnya didominasi oleh proses produksi ruang sosial yang bersifat politis. Penelitian Zong et al. (2025) menekankan bahwa faktor-faktor utama dari ruang publik meliputi bangunan umum, ruang hijau, dan keterlibatan masyarakat setempat, sementara tantangan seperti biaya pemeliharaan dan kurangnya tingkat partisipasi masih terus berlanjut. Artinya, ada kepentingan dominan yang lebih menekankan pada bentuk fisik dan infrastruktur kota daripada makna dan pengalaman sosial warganya. Akibatnya, ruang kota cenderung mengucilkan kebutuhan sosial dan pengguna, baik secara sosial maupun ekonomi. Selain itu, perencanaan ruang terbuka publik seringkali didesain tanpa menyesuaikan dengan konteks lokal dan karakteristik ruang di sekitarnya sehingga ruang tersebut menjadi tidak menyatu dengan lingkungan sekitar dan terisolasi.

Bandung memiliki sejarah yang kaya akan ruang publik (Margono & Zuraida, 2019). Dengan rangka untuk merevitalisasi taman-taman guna meningkatkan kualitas hidup dan indeks kebahagiaan, tidak sedikit taman-taman di Kota Bandung dirancang dengan tema tertentu untuk menarik komunitas tertentu dan meningkatkan partisipasi publik. Salah satu ruang terbuka publik yang memiliki konsep dan lokasi menonjol di Kota Bandung adalah Taman Film, yang dibangun di bawah kolong Jalan Layang Pasupati dan berada di tengah permukiman. Taman kota diakui sebagai ruang terbuka publik yang esensial yang melayani berbagai aktivitas dan kelompok masyarakat, terutama kelompok usia lanjut (Soltip et al., 2023).

Taman Film Bandung merupakan salah satu ruang terbuka hijau di Kota Bandung yang pemanfaatan ruang residu kota dengan pendekatan tematik, dirancang untuk mendukung kegiatan komunitas film, pemutaran film, dan aktivitas kreatif warga. Sejak diresmikan, Taman Film sempat digadang-gadang menjadi ikon ruang publik tematik. Namun, dalam perkembangannya, taman ini menghadapi penurunan fungsi yang signifikan. Kualitas Taman Film Kota Bandung saat ini ditinggalkan oleh komunitas sineas sebagai *venue* kegiatan karena fasilitas audio visual yang kurang mumpuni, birokrasi yang cukup rumit, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai (Himawan, 2023). Akibatnya, fungsi tematik taman tidak lagi berjalan dan pemanfaatan ruang menjadi pasif serta

informal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terhadap efektivitas perencanaan, implementasi, dan pengelolaan Taman Film sebagai ruang terbuka publik yang ideal.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap ruang terbuka publik tidak dapat hanya dilihat dari keberadaan fisik semata, melainkan perlu ditinjau secara menyeluruh dari konteks kebutuhan, kualitas perencanaan, proses pelaksanaan, hingga produk atau hasil akhir yang dicapai. Dalam upaya evaluasi yang sesuai kontekstualisasi tersebut, pendekatan *CIPP (Context, Input, Process, Product)* dinilai relevan untuk digunakan. Pendekatan CIPP digunakan karena memiliki kerangka kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi sebuah program/perencanaan, personil, organisasi dan kebijakan (Stufflebeam, 2014). Evaluasi dengan pendekatan CIPP mampu membantu menentukan relevansi tujuan suatu program serta apakah program tersebut secara efektif memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi (Hermawansyah et al., 2024). Oleh karena itu, pendekatan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (2014) diawal, menjadi kerangka evaluasi yang relevan. Model ini memungkinkan analisis evaluatif yang tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada kelayakan program, pelibatan pemangku kepentingan, keberfungsian fasilitas, dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat (Stufflebeam & Zhang, 2017).

Dalam konteks perkotaan, pendekatan CIPP (*Context, Input, Process, Product*) relevan pada beberapa aspek perkotaan. Manurung & Yusuf (2025) menggunakan metode CIPP untuk mengevaluasi pelaksanaan *Transit Oriented Development (TOD)* pada ruang terbuka publik dengan studi kasus di Kawasan Blok M Jakarta. Selain itu, pada aspek pelayanan ruang terbuka publik di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah DKI Jakarta juga menggunakan metode CIPP dalam mengevaluasi ruang terbuka publik (Pakpahan, 2024). Ditekankan juga oleh Alanshori et al. (2025) menunjukkan bahwa model CIPP banyak digunakan sebagai kerangka kerja evaluasi yang komprehensif dan fleksibel, terutama di Asia, antara tahun 2019 dan 2025. Model ini efektif dalam menilai konteks program, masukan sumber daya, proses pelaksanaan, dan hasil program.

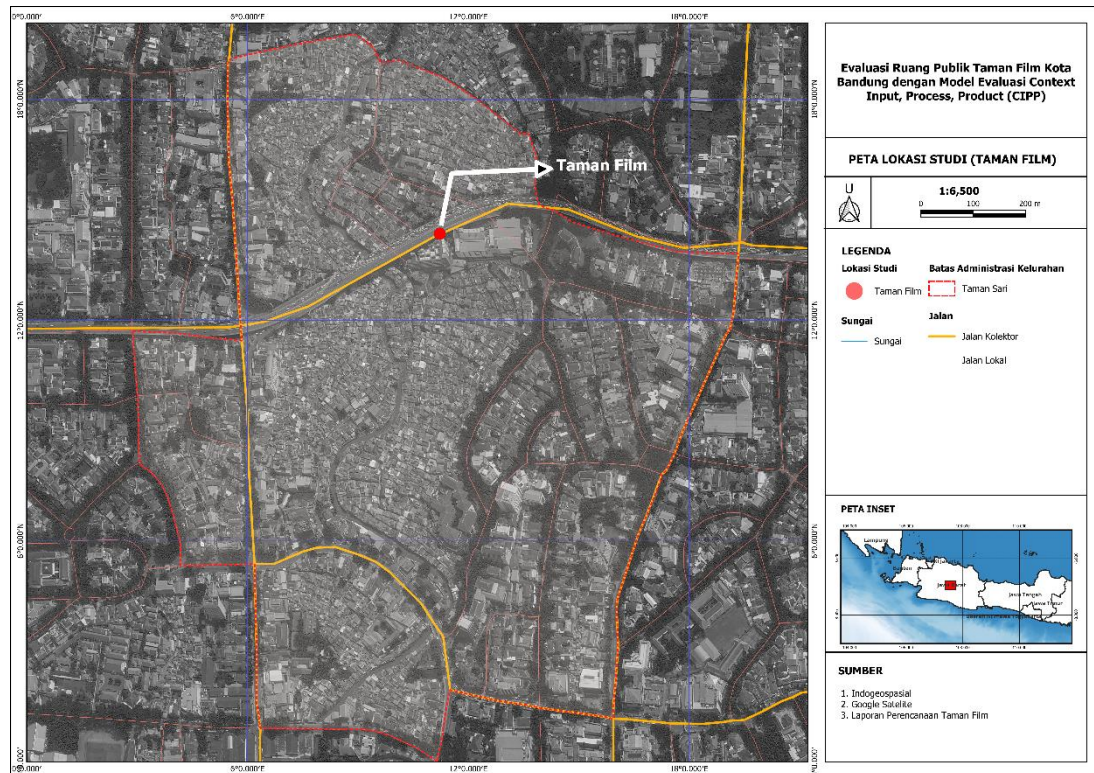
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ruang terbuka publik Taman Film di Kota Bandung menggunakan pendekatan model *CIPP*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan dan kekurangan program pembangunan Taman Film, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan ruang terbuka publik tematik lainnya di masa mendatang, agar lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi Penelitian

Taman Film merupakan ruang terbuka publik tematik yang terletak di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat tepatnya di bawah Jalan Layang Profesor Mochtar Kusumaatmadja atau dikenal dengan "Jembatan Pasupati", Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Secara fisik, Taman Film memiliki luas 1.155 m² yang diresmikan pada tahun 2014. Sejak terpilihnya Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung pada tahun 2013, Ridwan Kamil adalah orang yang memprakarsai rencana untuk Taman Film sebagai salah satu bagian dari taman tematik yang berada di bawah Jalan Layang Pasupati. Gambar 2 memperlihatkan kondisi sebelum dan sesudah pembangunan Taman Film.

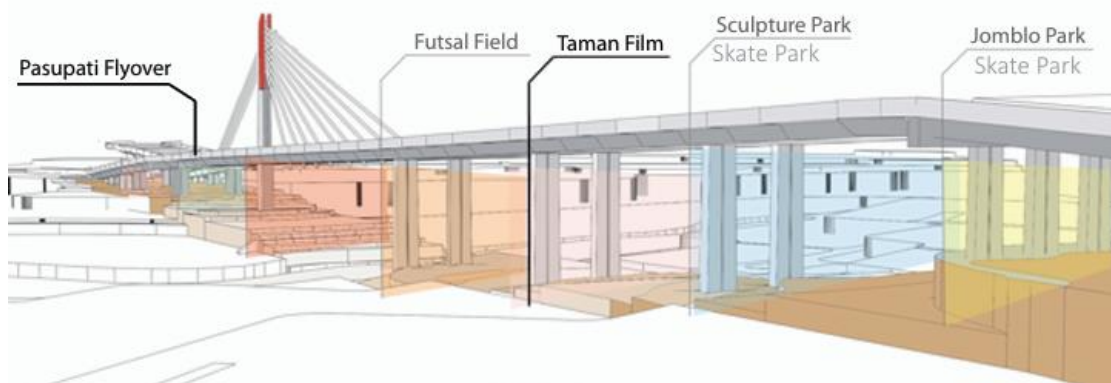
Pembangunan ruang publik atau taman tematik di bawah Jalan Layang Pasupati yang saling terhubung bertujuan untuk menyediakan akses pejalan kaki bagi masyarakat di daerah permukiman Taman Sari menuju ke pusat perbelanjaan *Cihampelas Walk* atau "Ciwalk" (lihat Gambar 3).



Sumber: *Taman Film Fluid and Spontaneous Space for Bandung*, SHAU Architecture & Urbanism, 2014
Gambar 1. Peta Lokasi Taman Film dan Administrasi Kelurahan Taman Sari



Sumber: *Taman Film Fluid and Spontaneous Space For Bandung*, SHAU Architecture & Urbanism, 2014
Gambar 2. Kondisi sebelum dan sesudah pembangunan Taman Film



Sumber: SHAU Architecture & Urbanism dan DPKP Kota Bandung, 2025
Gambar 3. Section Field Ruang Terbuka Publik Pasupati

Proyek ruang publik yang pertama dilakukan dalam pembangunan taman tematik di bawah Jalan Layang Pasupati ini adalah Taman Jomblo. Taman dengan tempat duduk kubus beton berdiri tunggal dengan warna warni. Setelah itu dilanjut dengan pembangunan Taman Skate, Taman Film, lapangan olahraga dan berakhir di taman hijau kampung setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung tahun 2025, Taman Film sendiri dibangun sepenuhnya didanai melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR dari sektor swasta tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Perusahaan yang berkontribusi dalam pendanaan yaitu PT Multi Strada Sarana Tbk dan Nata Sarana Internusa. Selain itu, Pada tahun 2016 dikutip dari website resmi Kota Bandung, sumber dana Taman Film murni bersumber dari hibah tidak menggunakan APBD sama sekali dan Taman Film diprediksi akan menghabiskan biaya operasional dan perawatan yang tinggi dengan biaya 30 juta/bulan jika dioperasikan selama 18 jam setiap harinya.

Tingginya biaya operasional ini disebabkan oleh adanya videotron atau layar lebar berukuran 6x4 meter. Videotron ini berfungsi sebagai pemutar film atau menonton pertandingan sepak bola, khususnya tim Persib. Acara Nonton Bersama (nobar) merupakan salah satu tujuan utama dari dibangunnya Taman Film, pada saat awal terbangunnya Taman Film, videotron ini sering digunakan untuk nobar pertandingan sepak bola dari Club Persib. Namun satu tahun beroperasi tepatnya pada hari Minggu, 4 Oktober 2015 saat pasca pertandingan Persib melawan Mitra Kukar terjadi kerusakan di berbagai fasilitas Taman Film, hal ini menyebabkan kerugian yang cukup besar. Menurut hasil wawancara peneliti dengan seorang tinggal disekitar Taman Film mengatakan bahwa sejak kerusakan terjadi menjadi titik awal keaktifan Taman Film menurun, puncaknya adalah pada tahun 2017 disebabkan oleh fasilitas videotron Taman Film tidak bisa digunakan karena terjadi kerusakan. Hingga tahun 2024 Taman Film terbengkalai dan ditinggalkan. Pada 2025 area sekitar Taman Film sudah dilakukan revitalisasi guna meningkatkan keaktifan kembali fungsi Taman Film. Revitalisasi tersebut memberikan beberapa area baru disekitar Taman Film.

Metode Analisis

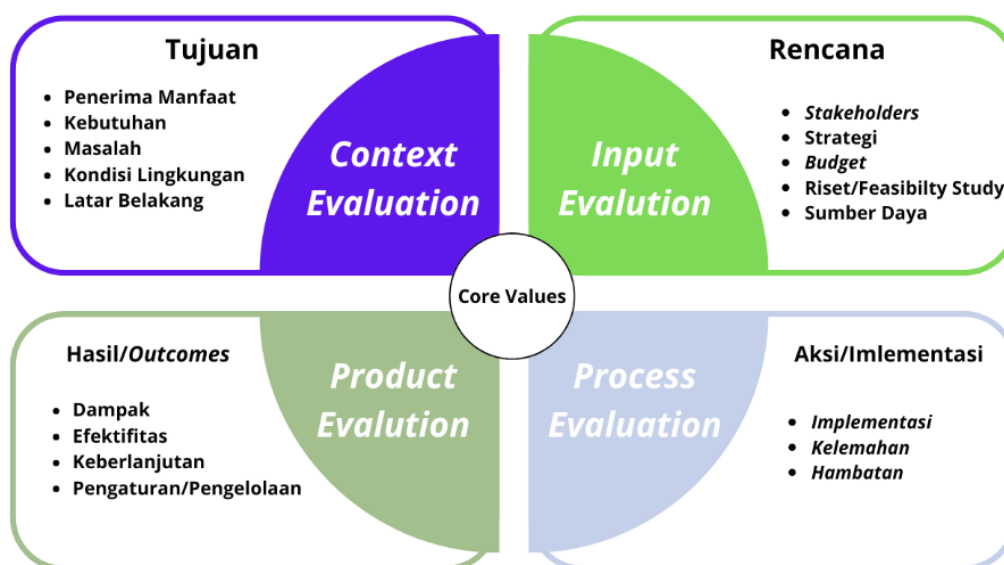
Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi terhadap Taman Film sebagai ruang terbuka Publik. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan model *CIPP (Context, Input, Process, Product)*. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menyajikan data dari berbagai sumber bukti empiris. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disusun dalam kerangka evaluasi model *CIPP (Context, Input, Process, Product)*. Model *CIPP* ini digunakan sebagai pendekatan evaluatif yang komprehensif untuk menilai berbagai aspek. (Stufflebeam, 2014).

Ruang lingkup objek yang dievaluasi pada penelitian ini adalah periode tahun 2014 hingga 2025. Selama periode tersebut, Taman Film mengalami berbagai dinamika, seperti kerusakan videotron, revitalisasi tahun 2023, dan perubahan pola pemanfaatan. Evaluasi difokuskan untuk menilai hasil akhir, dampak sosial, keberfungsian fasilitas, serta potensi replikasi konsep taman tematik, bukan untuk memperbaiki proses perencanaannya (Evaluasi Formatif).

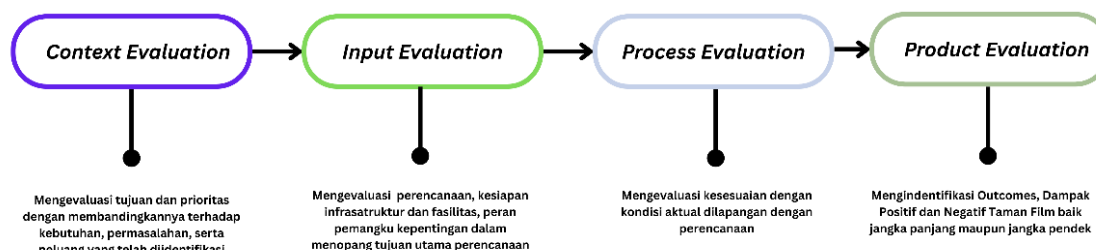
Pendekatan model *CIPP* dalam analisis deskriptif kualitatif memastikan bahwa setiap tahap penelitian dievaluasi secara sistematis, memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas, kualitas, dan keberlanjutan dari Taman Film sebagai ruang terbuka publik tematik. Ruang lingkup *Context, Input, Process, Product CIPP* dalam penelitian ini dirumuskan dengan menterjemahkan konsep *CIPP* (Stufflebeam, 2014).

Evaluasi *Context (C)* menilai kebutuhan, peluang, masalah dan kondisi dinamika kontekstual dari pembangunan Taman Film. Hal ini dilakukan untuk memperjelas tujuan dan prioritas program. Evaluasi *Input (I)* menilai strategi program, rencana aksi,

pengaturan staf, dan anggaran dari segi kelayakan dan potensi efektivitas biaya untuk memenuhi kebutuhan sasaran dan mencapai tujuan. Evaluasi input dapat bersifat komparatif, seperti dalam mengidentifikasi dan menilai berbagai opsi untuk mencapai tujuan, atau bersifat non-komparatif, seperti menilai satu rencana dan komponennya. Evaluasi *Process (P)* memantau, mendokumentasikan, menilai, dan melaporkan tentang pelaksanaan rencana. Evaluasi Proses bertujuan memberikan *feedback* terhadap implementasi perencanaan atau menelaah apakah implementasi sudah sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan. Evaluasi *Product (P)* dalam model CIPP bertujuan untuk menilai hasil yang dicapai dari suatu program secara menyeluruh, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Komponen kunci model CIPP dan alur pelaksanaan CIPP dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5.



Sumber: Stufflebeam & Zhang, 2017
Gambar 4. Komponen Kunci Model CIPP



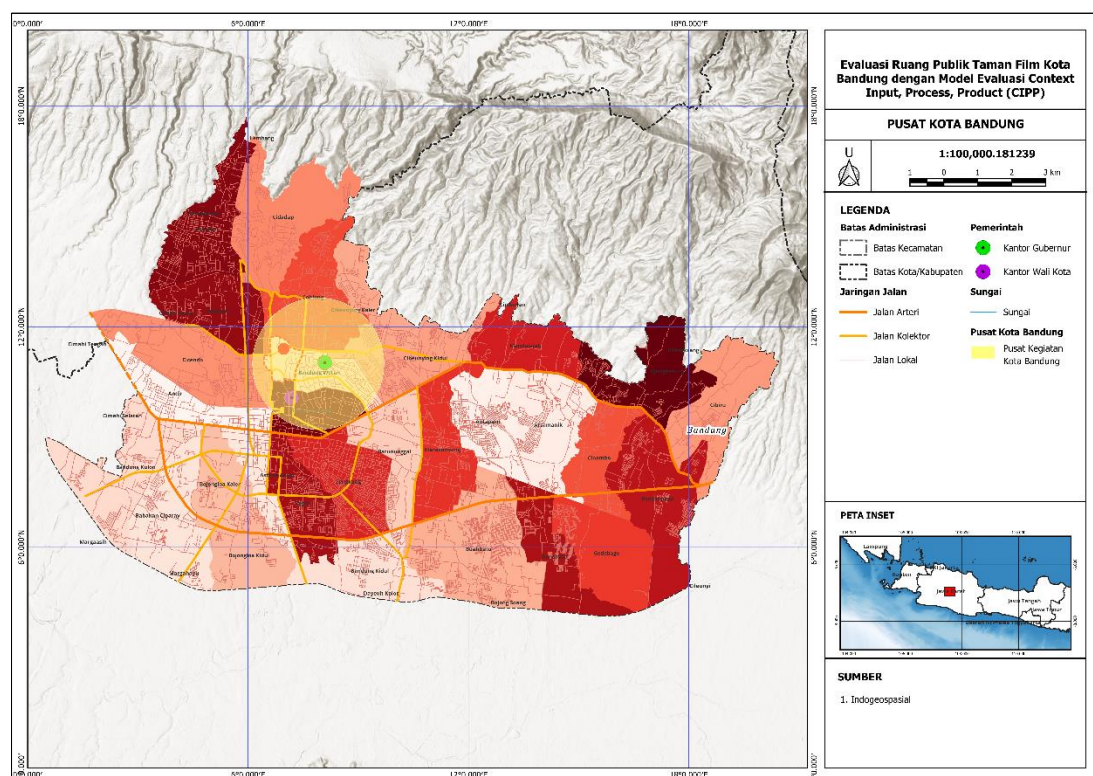
Sumber: Stufflebeam & Guili Zhang, 2017
Gambar 5. Alur Pelaksanaan CIPP

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Context (C)

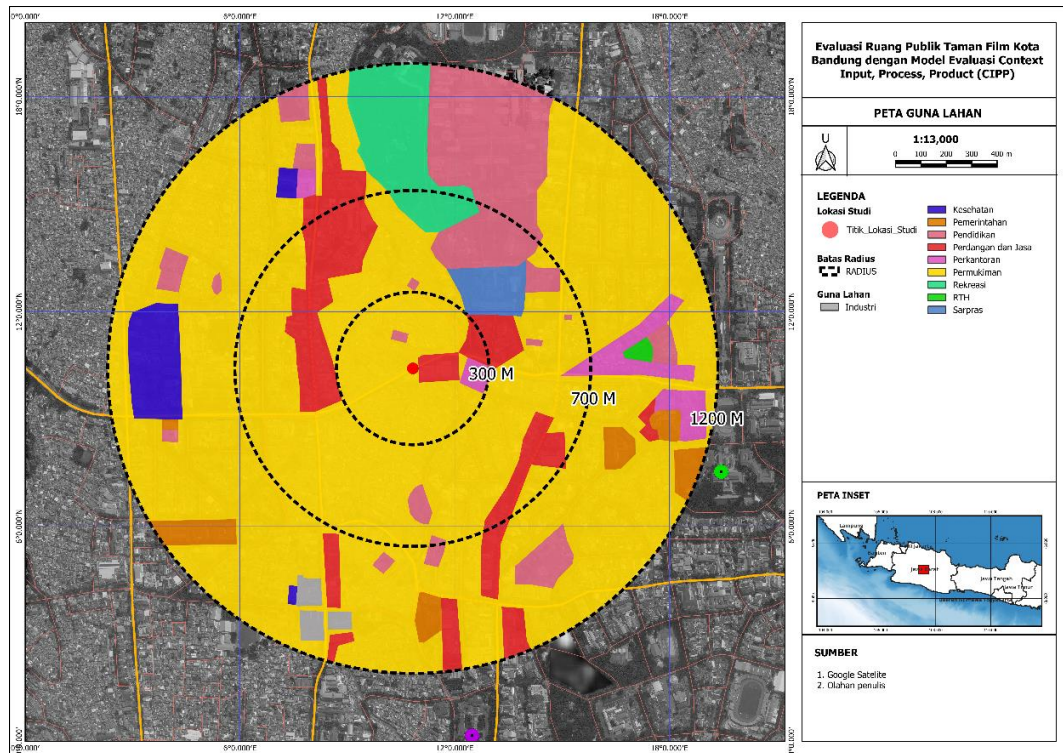
Perancangan kota yang inklusif sebagian bergantung pada konsentrasi spasial dari berbagai jenis penggunaan lahan, sehingga tempat-tempat dan fasilitas menjadi mudah diakses, serta transportasi umum menjadi layak secara operasional (Carmona et al., 2003). Selain itu Seperti yang disarankan oleh *Project for Public Space* (PPS, 1999, hlm. 51): dalam (Carmona et al., 2003) "Ketika Anda mengamati sebuah ruang, Anda mempelajari bagaimana ruang tersebut benar-benar digunakan, bukan bagaimana Anda berpikir ruang tersebut digunakan." Ruang terbuka publik kini dinilai tidak hanya dari wujud fisiknya, tetapi juga dari perannya dalam membangun kohesi sosial. Tinjauan sistematis Qi et al.

(2024) atas 63 studi menunjukkan bahwa atribut fisik seperti aksesibilitas, keragaman guna lahan, dan ketersediaan perabot jalan mendorong interaksi warga, dengan aksesibilitas menjadi prasyarat ko-hadiran (*co-presence*). Peran sosial tersebut bergantung pada seberapa "publik" sebuah ruang. Disamping itu, melalui penilaian berbasis GIS atas 38 ruang terbuka di Kota Sylhet, Das et al. (2026) menemukan bahwa *publicness* paling ditentukan oleh aksesibilitas dan pengelolaan; sebaliknya, kepemilikan pemerintah dan fitur alami yang tidak terintegrasi berkorelasi negatif karena kontrol akses yang ketat dan pemanfaatan yang rendah. Jian et al., (2020) memberi temuan ini landasan normatif: aksesibilitas dan inklusivitas merupakan persoalan keadilan spasial (*spatial justice*), dan dalam kerangka evaluasi mereka, akses serta pengelolaan menjadi dimensi yang paling menentukan. Meski berangkat dari sudut yang berbeda, ketiga kajian menunjuk faktor yang sama yaitu nilai sosial ruang publik bergantung pada aksesibilitas dan pengelolaan yang setara. Pada Taman Film, prasyarat itu belum terpenuhi meskipun lokasinya strategis.



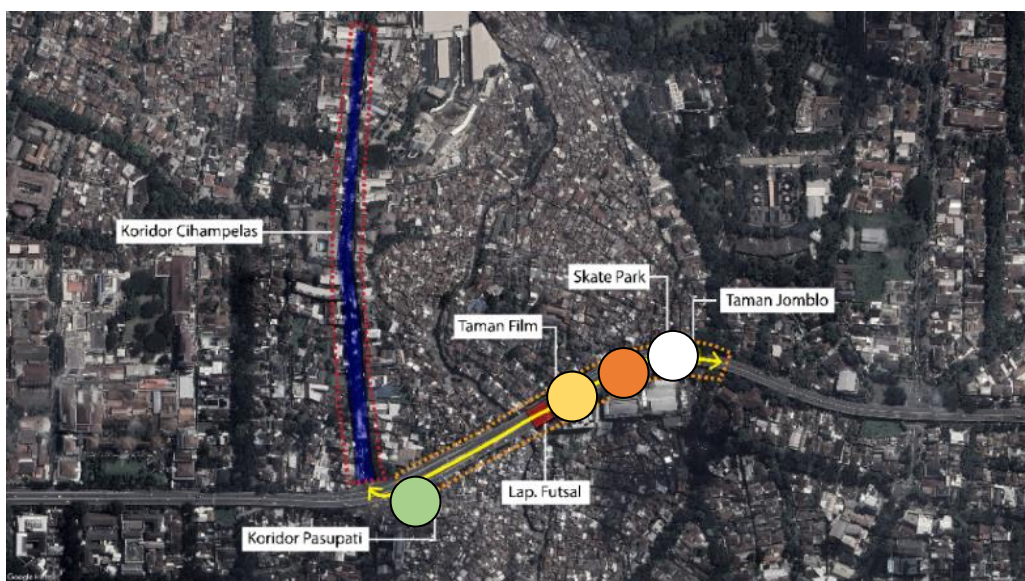
Gambar 6. Peta Posisi Taman Film terhadap Pusat Kota

Taman Film terletak strategis di jantung Kota Bandung, tepatnya di Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan sebuah kawasan dengan aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan yang tinggi. Lokasi ini menempatkan Taman Film pada posisi penting dalam struktur kota, dengan aksesibilitas baik dari berbagai arah. Potensi ini menjadikannya ruang terbuka publik yang mendukung kebutuhan rekreasi, interaksi sosial warga, dan kehidupan kota yang dinamis. Lingkungan sekitar taman juga memiliki konsentrasi aktivitas yang tinggi dengan keberagaman tata guna lahan, seperti permukiman, perdagangan dan jasa, pendidikan, serta fasilitas umum. Kedekatannya dengan fasilitas pendidikan, pusat perbelanjaan, dan kantor pemerintahan menjadikan taman ini memiliki potensi besar sebagai ruang publik yang mendukung aktivitas warga secara luas.



Gambar 7. Peta Tata Guna Lahan Sekitar Taman Film

Berdasarkan pola guna lahan yang ditunjukkan pada Gambar 7, Taman Film berjarak 300–700 meter dari pusat perbelanjaan Cihampelas/Ciwalk yang merupakan tujuan Taman Film, menurut Rojas (2016); Gehl & Jan (2010) dalam bukunya *Cities for People* menerangkan bahwa jarak yang dapat diterima oleh manusia untuk berjalan adalah sekitar 500 meter dengan kondisi trotoar dan jalurnya menarik, jika kondisi trotoar dan jalurnya memiliki kondisi sebaliknya, maka jarak 200-300 meter merupakan jarak yang terasa jauh. Jarak udara dari Taman Film menuju pusat perbelanjaan Cihampelas masih sesuai untuk aktivitas pejalan kaki menurut teori Gehl. Namun, meski secara radius dapat diterima, kondisi akses jalan dan keterhubungan antar taman tematik di bawah Jalan Layang Pasupati tidak mendukung aktivitas berjalan kaki yang nyaman dan terintegrasi menuju pusat perbelanjaan. Hasil observasi yang dilakukan penulis untuk menggambarkan kondisi keterhubungan setiap taman tematik dapat dilihat pada Gambar 8.





Gambar 8. Kondisi Aksesibilitas sepanjang koridor Cihampelas

Taman Film dengan tujuan awal untuk wadah “nobar” tidak lagi berjalan akibat rusaknya fasilitas utama yaitu videotron. Kini, Taman Film digunakan untuk aktivitas lain seperti kegiatan komunitas pelajar, olahraga, seni, dan terutama menjadi ruang bermain bagi anak-anak sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi taman telah bergeser menjadi ruang publik yang menampung aktivitas beragam dan spontan sesuai kebutuhan warga, sehingga menuntut penyesuaian pengelolaan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial di sekitarnya. Hal ini merupakan salah satu fenomena yang penting bagi Taman Film karena menurut (Carmona et al., 2003) menjelaskan konsep *discovery* dalam Ruang Terbuka Publik yang menekankan pentingnya keberagaman, dinamika, serta unsur kejutan dalam bentuk pengalaman ruang yang menarik dan menyenangkan.



Sumber: <https://ekschool.id/>, 2025

Gambar 9. Kegiatan Komunitas selain Nobar

Sebagai ruang terbuka publik di kawasan perkotaan padat aktivitas, keberfungsian Taman Film dipengaruhi oleh keterhubungannya dengan lingkungan sekitar. Akses menuju taman hanya melalui dua jalan sempit dengan kondisi trotoar yang kurang layak, pencahayaan yang belum memadai, dan ketiadaan *signage* penunjuk arah. Kenyamanan suatu ruang dapat berkurang akibat sirkulasi yang tidak tertata dengan benar, misalnya kurang adanya kejelasan sirkulasi, tiadanya hierarki sirkulasi, tidak jelasnya pembagian ruang dan fungsi ruang, antara sirkulasi pejalan kaki (pedestrian) dengan sirkulasi

kendaraan bermotor (Hakim & Utomo, 2003 dalam Bandaso & Widjajanti 2019). Hal ini menjadi hambatan aksesibilitas yang perlu diatasi untuk mendukung kunjungan dan pemanfaatan taman secara optimal. Menurut (Bentley, 2011) hanya tempat yang *accessible* yang akan menjadi pilihan bagi orang untuk dikunjungi, ia menyebutnya sebagai "*Permeability*".



Gambar 10. Kondisi Eksisting Aksesibilitas Menuju Taman Film

Setelah mengetahui kondisi spasial, fungsional, dan keterhubungan dengan lokasi sekitar sebenarnya Taman Film memiliki potensi spasial dan fungsional yang besar, namun terdapat beberapa hal yang menghambat dalam merespon potensi tersebut, antara lain kurangnya infrastruktur pendukung sekitar untuk merespon potensi spasial dan fungsional Taman Film, kurangnya Kesiapan Taman Film dalam menghadapi dinamika perubahan fungsional dan aksesibilitas menuju Taman Film yang kurang baik.

Evaluasi Input (I)

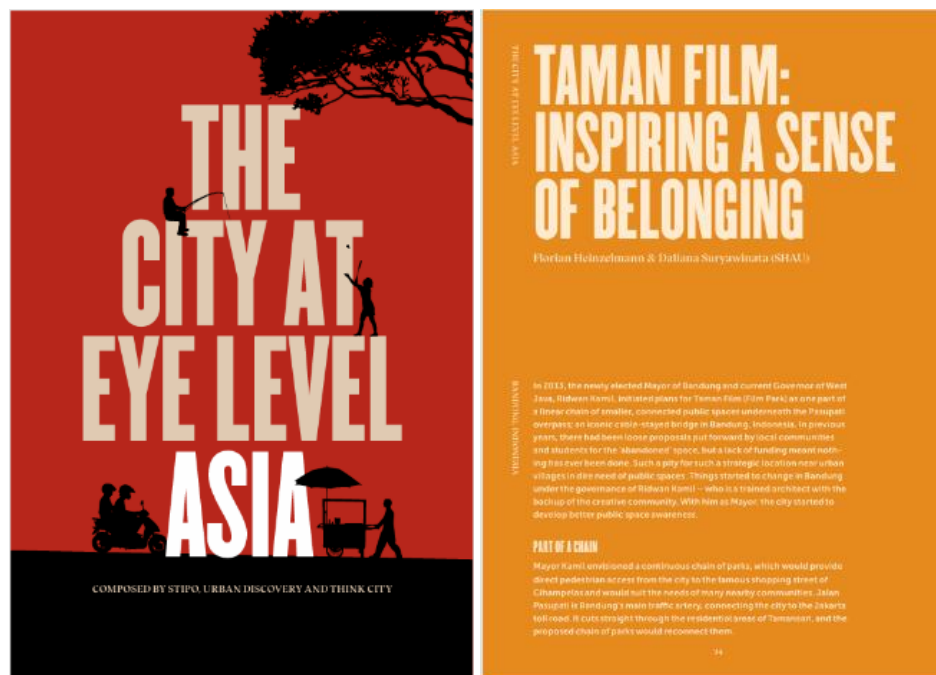
Evaluasi input pertama menilai kualitas perencanaan Taman Film sebagai lanjutan dari analisis konteks. Hal ini penting untuk memahami strategi dan kesiapan program. Taman Film dirancang oleh SHAU Architect dengan dokumen konsep desain yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antar pemangku kepentingan, meski belum sepenuhnya mendorong keterlibatan masyarakat secara luas.

Berdasarkan tinjauan dokumen perencanaan Taman Film, ditemukan bahwa rumusan tujuan hanya dijelaskan secara umum belum secara strategis dijelaskan. Hal ini berpotensi terjadinya kesalahpahaman koordinasi lintas pemangku kepentingan serta penilaian keberhasilan program. Selain itu, penjabaran tujuan yang lebih strategis justru muncul pada sumber sekunder buku *The City At Eye Level* (2020), bagian "Taman Film:

Inspiring A Sense Of Belonging” yang di tulis oleh pemilik *SHAU Architehct and Urbanism* yaitu Florian Heinzelman dan Daliana Suryawinata setelah taman dioperasikan. Dalam hal evaluasi temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan awal semestinya penting untuk meninjau kemungkinan dinamika jangka panjang serta analisis mendalam terkait kondisi sosial dan spasial karena menurut Gehl & Jan (2010), keberlanjutan sosial juga memiliki dimensi demokrasi, yakni menyediakan ruang publik yang mudah diakses dan mengundang sebagai tempat bertemu antar warga, baik dalam acara formal maupun pertemuan spontan. Hal ini penting agar masyarakat bisa berinteraksi lintas latar belakang sosial, memperkuat kohesi sosial dan rasa memiliki terhadap kota.



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, 2025
Gambar 11. Dokumen Perencanaan Taman Film Tahun 2014



Sumber: Heinzelman & Suryawinata, 2020
Gambar 12. Buku The City At Eye Level

Berdasarkan hasil observasi penulis, kini Taman Film telah didukung oleh beberapa fasilitas penunjang dan area baru setelah dilakukan revitalisasi pada tahun 2023, fasilitas tersebut berada di luar dari delineasi Taman Film dan bukan bagian dari awal perencanaan

Taman Film. Revitalisasi yang dilakukan menghasilkan beberapa area baru dan fasilitas baru sekitar Taman Film. Kenyamanan dalam ruang publik dapat dirasakan oleh pengguna taman melalui beberapa faktor seperti keberadaan ragam vegetasi, kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana hingga kebersihan (Chairunnisa et al., 2023)



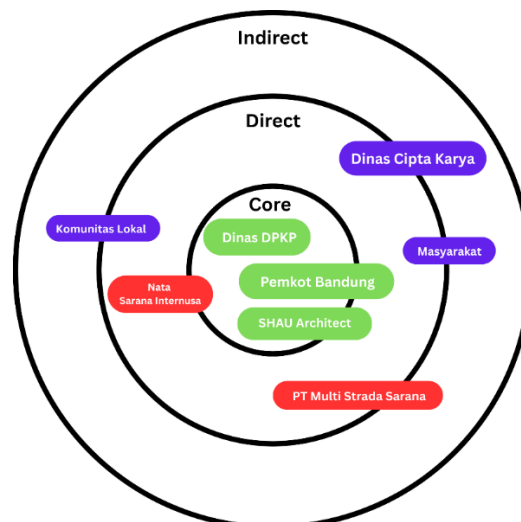
Sumber: Heinzelmann & Suryawinata, 2020

Gambar 13. Kondisi Pasca Revitalisasi sekitar Taman Film

Meski saat ini area sekitar Taman Film sudah memiliki beberapa fasilitas penunjang yang bukan merupakan perencanaan awal Taman Film, namun Taman Film juga memiliki infrastruktur dan fasilitas yang sudah direncanakan diawal antara lain videotron, Flat Area, Sitting Area. Penyediaan videotron dan desain tempat duduk dalam perencanaan awal Taman Film relevan dengan fungsi menonton bersama, namun aspek pencahayaan, sanitasi, peribadatan, area bermain anak, dan fasilitas pendukung lainnya baru terealisasi pasca revitalisasi. Hal ini menunjukkan terdapat kurangnya dalam memperhitungkan kebutuhan operasional jangka panjang dalam perencanaan Taman Film. Revitalisasi pada 2023 menunjukan kekurangan dan kurangnya dalam perencanaan awal Taman Film, meski juga menunjukkan respons pemerintah walau respons tersebut terlambat lebih dari satu dekade sejak peresmian taman film baru dilakukan revitalisasi.

Selanjutnya dalam pembahasan evaluasi Input penulis akan menjelaskan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan Taman Film. Secara umum Taman Film sudah memiliki pemangku kepentingan yang jelas, namun pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan menunjukkan kekurangan. perencanaan hampir sepenuhnya diserahkan kepada *SHAU Architect* dengan keterlibatan pemerintah yang minim, yang berpotensi menimbulkan miskomunikasi dalam pelaksanaan program serta ketidaksinambungan antara desain ruang dan kebutuhan operasional jangka panjang. Masyarakat, komunitas lokal, pengguna potensial juga tidak semuanya terlibat dalam proses perencanaan. Meskipun terdapat percobaan penayangan film terhadap anak-anak pada saat proses perencanaan. Hal ini menunjukan bahwa metode perencanaan *Bottom-Up* atau *Community Based Planning (CBP)* yang dilakukan belum sepenuhnya mewakili dari setiap elemen masyarakat, hanya anak anak yang menjadi sampel dalam melakukan perencanaan *Bottom-*

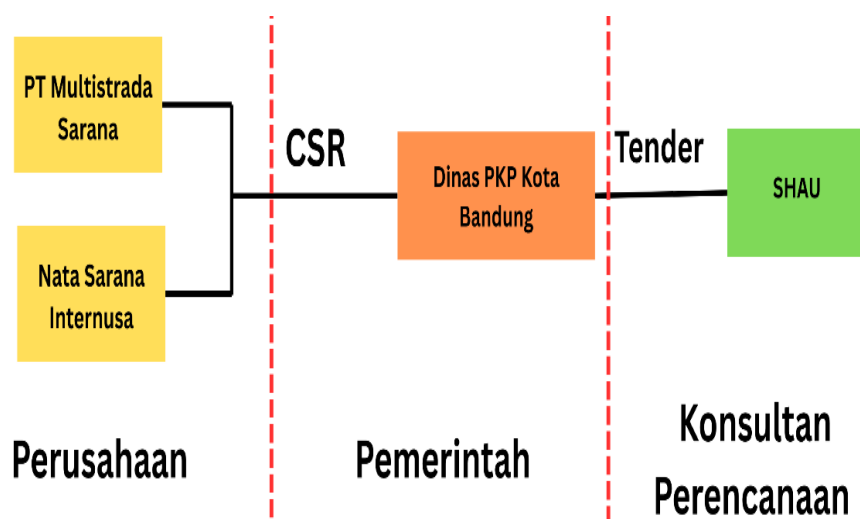
Up atau *CBP* yang seharusnya dengan pendekatan ini dapat memaksimalkan target pengguna dan fungsinya. Keterlibatan masyarakat dalam proses desain kota kini semakin dianggap penting sebagai pendekatan untuk mengurangi kesenjangan antara pihak profesional dan warga biasa, antara pihak yang memiliki kuasa dan yang tidak, serta antara desainer dengan pengguna ruang. Pendekatan partisipatif ini dapat dilakukan secara *top-down* maupun *bottom-up* (Carmona et al., 2003)



Gambar 14. Actor Mapping Taman Film

Taman Film memiliki pendanaan yang berasal dari PT Multistrada Sarana dan Natasarana Internusa melalui program CSR. Berdasarkan dokumen laporan "Kolaborasi Pembangunan Melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kota Bandung" oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Kota Bandung, dana yang disalurkan melalui CSR sebesar Rp1.575.000.000,00.

Skema CSR pada pembangunan Taman Film menunjukkan kolaborasi positif pemerintah dan sektor swasta yang mengurangi beban APBD. Namun pembiayaan CSR bersifat terbatas, sehingga pemerintah tetap perlu menyiapkan anggaran jangka panjang untuk operasional, pemeliharaan, dan aktivasi program pasca pembangunan.



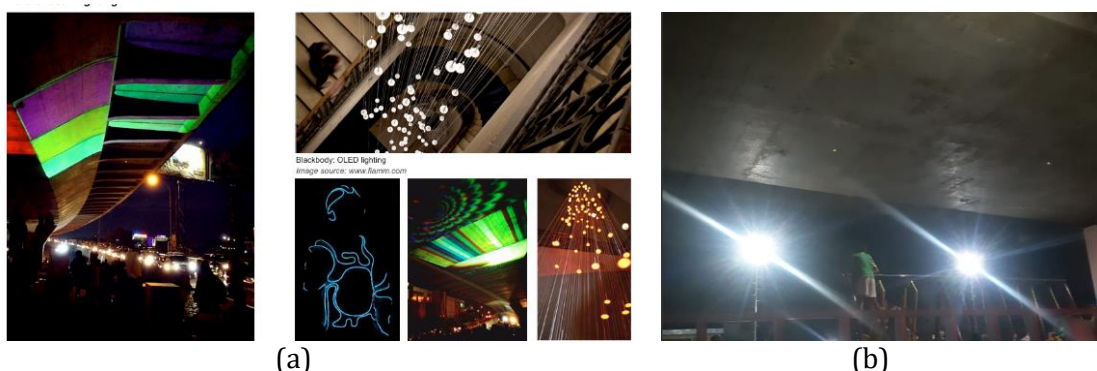
Sumber: Dinas PKP Kota Bandung, 2025

Gambar 15 Alur Pendanaan Taman Film

Evaluasi *Process* (P)

Tujuan Taman Film sebagai ruang nobar, duduk santai, dan acara sempat terwujud pada awal operasional. Namun sejak 2017 program nobar terhenti karena kerusakan videotron. Dalam evaluasi proses, hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara rencana dan implementasi serta kurangnya pemeliharaan yang menghambat keberlanjutan fungsi taman sesuai tujuan awal.

Selain videotron, ketidaksesuaian juga terjadi pada aspek pencahayaan. Meski perencanaan awal memuat konsep detail untuk menciptakan suasana aman dan estetis di malam hari, implementasinya tidak terlaksana sepenuhnya bahkan setelah revitalisasi. Kendala ini disebabkan oleh kompleksitas proses pemasangan instalasi listrik pada struktur jalan layang, yang memerlukan koordinasi lintas sektor dalam jangka panjang, mengingat pengelolaan jalan layang berada di luar kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung.



Sumber: *Dokumen Perencanaan Taman Film dan Hasil Observasi, 2025*
Gambar 16. (a) Rencana Lighting Taman Film (b) Kondisi Eksisting Pencahayaan

Secara legal, pembangunan Taman Film di bawah jalan layang sesuai izin RDTR Kota Bandung 2024–2044 untuk ruang terbuka hijau publik (Pemerintah Kota Bandung, 2024). Namun terdapat ketidaksesuaian antara fungsi zonasi RTH-8 dan aktivitas utama seperti pemutaran film dan kegiatan aktivitas desain konten kreatif yang tidak diperbolehkan dalam zonasi tersebut. Penyusunan kebijakan dalam bentuk rencana pengembangan, aturan zonasi, dan panduan desain merupakan bagian dari proses desain yang lebih luas. Kegiatan ini bukan hanya administratif, tetapi juga mencerminkan proses pemecahan masalah yang kreatif. Carmona et al. (2003) karena kebijakan ini umumnya disusun untuk menghadapi usulan pembangunan yang belum diketahui secara pasti, maka isi kebijakannya pun cenderung bersifat abstrak dan jangka panjang. Perbedaan antara kebijakan dan desain/perencanaan menimbulkan persoalan normatif dan menunjukkan disonansi antara inovasi ruang publik dan regulasi tata ruang yang perlu ditinjau kembali agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara umum Taman Film hanya memiliki tiga infrastruktur utama: videotron, tempat duduk, dan flat area. Namun keberfungsian ketiganya belum optimal, terutama videotron yang rusak dan tidak dapat digunakan, sehingga tujuan awal sebagai ruang pemutaran film belum dapat direalisasikan secara berkelanjutan. Evaluasi terhadap Taman Film tidak dapat berhenti pada aspek pembangunan fisik semata, sebab keberhasilan ruang publik juga sangat ditentukan oleh bagaimana ruang tersebut dikelola dalam jangka panjang.

Evaluasi Taman Film menunjukkan bahwa pengelolaan belum berjalan sistematis dan terstruktur, tanpa petugas kebersihan, keamanan, atau teknisi rutin (hasil survey lapangan, 2025). Menurut Wibowo & Mangasa (2016) dalam Caesandra et al. (2020), selain aspek kualitas dan kuantitas kondisifisik taman seperti tersedianya bangku taman, tempat sampah, lampu taman (penerangan), jalur pedestrian, tempat parkir, plaza (arena serbaguna), toilet, gazebo, papan informasi, instalasi listrik dan jaringan drainase sebaga

istandar minimum fasilitas untuk taman skala kota perlu diperhatikan pula keberadaan pihak pengelola. Ruang pada kolong Jalan Layang Pasupati mengalami kekosongan pengelolaan karena lambatnya proses pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Ihsanti & Sugiyantoro, 2024). Ketidakhadiran pengelola formal berdampak pada kerusakan fasilitas yang tak tertangani, sampah, vandalisme, dan penggunaan ruang tak terkontrol. Meski secara struktural di bawah DPKP Kota Bandung, praktik pengelolaan operasional masih belum optimal tanpa mekanisme jelas untuk pemeliharaan atau dukungan program komunitas. Akibatnya, keberfungsian taman lebih bergantung pada inisiatif warga daripada dukungan kelembagaan. Dalam konteks tata kelola perkotaan, meskipun keterlibatan langsung sektor publik dalam penciptaan lingkungan baru semakin terbatas, peranannya tetap signifikan dalam menjamin kualitas desain pembangunan melalui mekanisme perencanaan, konservasi, dan kontrol bangunan. Peran ini penting untuk memastikan bahwa desain yang diajukan oleh sektor swasta tetap berpihak pada kepentingan publik (Carmona et al., 2003).

Evaluasi Product (P)

Evaluasi produk bertujuan menilai hasil program secara menyeluruh dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Penilaian ini mencakup ketercapaian tujuan, dampak positif atau negatif bagi masyarakat, serta potensi replikasi model ruang publik tematik di lokasi lain, untuk memahami efektivitas dan keberlanjutan program. Taman tematik merupakan tren yang masih eksis di Indonesia sebagai konsep perencanaan ruang terbuka publik taman. Konsep taman tematik muncul karena karakteristik masyarakat Indonesia yang menyukai visualisasi yang nyentrik dan menonjol, selain itu taman tematik juga muncul karena memang kebutuhan komunitas – komunitas tertentu seperti Taman Anjing, Taman Anak, Taman Potret, Taman Lansia, Taman Film dan taman taman lain yang memiliki identitas tematik lainnya. Lebih lanjut Steiner & Butler (2007) telah membahas fenomena taman tematik ini, ia menyebutkan dalam bukunya bahwa sejumlah trend budaya dan teknologi terbaru telah menciptakan permintaan baru pada sistem taman saat ini yang disebut sebagai "*Special Use*". Namun demikian, "*Special Use*" tidak bisa dituangkan begitu saja ke dalam konsep ruang terbuka publik. Pengembangan fasilitas penggunaan khusus didorong oleh permintaan lokal dan keadaan tertentu.

Berdasarkan pembahasan pada evaluasi input sebelumnya bahwa Taman Film belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal yaitu mewadahi komunitas film dan untuk menonton film bersama. Hal ini menjadi bukti bahwa konsep taman tematik dalam taman film tidak didasari pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan komunitas lokal. Jika dilihat dari konsep taman tematik menurut Steiner & Butler (2007) yaitu konsep "*Special Use*", konsep taman tematik yang dituangkan dalam Taman Film masih belum tepat sasaran.

Keberadaan Taman Film yang berada di dekat dengan permukiman menjadikan Taman Film sebagai ruang kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Hal ini menciptakan *Sense Of Belonging* terhadap Taman Film, secara tidak langsung Taman Film menjadi "Urban Living Room" (Heinzelmann & Suryawinata, 2020). Menurut Roger Scruton (1984) dalam Hantono & Ariantantrie (2018), bahwa istilah "Ruang Publik" digunakan untuk menggambarkan tempat yang dirancang secara sederhana dimana setiap orang memiliki hak mengaksesnya tempat pertemuan antara pengguna individu yang tidak terencana dan bukan yang bersifat rutinitas, dan sikap sopan santun antar sesama. Taman Film menjadi tempat bermain anak-anak setelah sekolah, tempat ibu mengajak balitanya untuk belajar berjalan, tempat ibu-ibu arisan, tempat berlatih taekwondo, ibu-ibu senam dan kegiatan bersantai setelah pekerjaan rumah selesai. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan Taman Film tidak sepenuhnya sesuai dengan rancangan awal yaitu sebagai wadah komunitas film dan kegiatan nobar, meski demikian Taman Film tetap memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai wadah interaksi dan kegiatan kehidupan sehari-hari.

Taman film sebenarnya memiliki potensi untuk dijadikan acuan untuk perencanaan ruang publik yang mampu mengubah ruang sisa atau terbengkalai seperti di bawah jalan layang. Secara fisik, Taman Film dapat merubah area yang terbengkalai bahkan tidak

terdefinisi menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan secara sosial, fungsional, dan estetika tanpa harus membuka lahan baru. Secara sosial, kegiatan komunitas, aktivitas bermain anak, serta aktivitas informal warga yang berlangsung dapat menjadikan titik interaksi lintas kelompok usia dan latar belakang sosial yang hal ini berguna bagi pembelajaran sosial. Menurut Gehl (2011), dalam bukunya *Life Between Building* berpendapat bahwa kesempatan untuk mendengar dan melihat orang lain didalam kota dapat memberikan pengetahuan yang bernilai tentang bagaimana kondisi sosial lingkungan disekitarnya dan mengetahui secara khusus bagaimana cara hidup dan bekerjanya orang-orang yang berada disekitar kita. Terkhusus pada anak-anak yang tumbuh berdasarkan pada pengamatan lingkungan sekitarnya, tetapi perlu juga dilakukan pengawasan dan pengarahan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengevaluasi Taman Film sebagai ruang terbuka publik menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) untuk mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan pembentukan ruang, kondisi aktual, dan pengalaman pengguna. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Taman Film memiliki potensi strategis sebagai ruang publik di pusat Kota Bandung karena berada pada kawasan dengan intensitas aktivitas perkotaan yang tinggi dan memiliki kedekatan dengan permukiman, pendidikan, perdagangan, serta jasa. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kualitas ruang publik yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesenjangan tersebut terlihat dari belum optimalnya fungsi tematik, kurangnya aksesibilitas pejalan kaki, minimnya fasilitas pendukung, kurangnya keberlanjutan program, serta minimnya sistem pengelolaan dan pemeliharaan.

Pada dimensi *context*, Taman Film belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna dan dinamika kawasan. Keberadaan taman lebih banyak dimanfaatkan untuk aktivitas pasif seperti duduk dan bersantai, sementara fungsi utama sebagai ruang pemutaran film tidak lagi berjalan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan ruang publik tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian lokasi, tetapi juga oleh kemampuannya beradaptasi terhadap kebutuhan dan pola aktivitas masyarakat. Pada dimensi *input*, kurangnya fasilitas dan minimnya dukungan kelembagaan menjadi faktor yang menghambat keberlanjutan fungsi taman. Revitalisasi fisik yang dilakukan belum diikuti dengan penguatan model pengelolaan, pembiayaan, pemeliharaan, dan kelembagaan yang berkelanjutan. Selanjutnya, pada dimensi *process*, kerusakan fasilitas utama, minimnya pengawasan, tidak tersedianya petugas kebersihan dan keamanan, serta minimnya pelibatan komunitas menunjukkan adanya kesenjangan antara pembangunan fisik dan pengelolaan ruang. Pada dimensi *product*, Taman Film belum menghasilkan kualitas ruang publik yang sesuai dengan tujuan awal pembentukannya karena fungsi tematik tidak berjalan dan manfaat sosial yang terbentuk masih bersifat informal, sementara, dan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas interaksi sosial masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan model CIPP sebagai kerangka evaluatif untuk memahami *public space quality* bukan hanya sebagai kualitas fisik ruang, tetapi sebagai suatu proses yang terbentuk secara berkelanjutan dari kesesuaian konteks, kecukupan input, kualitas proses pengelolaan, hingga produk dan dampak yang dihasilkan ruang. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kualitas ruang publik merupakan suatu continuum yang tidak dapat dipisahkan antara aspek perencanaan, penyediaan fasilitas, pengelolaan, aktivitas, dan pengalaman pengguna. Dengan demikian, revitalisasi fisik semata tidak secara otomatis menghasilkan ruang publik yang berkualitas apabila tidak disertai dengan sistem pengelolaan, program, dan kelembagaan yang mampu menjaga keberfungsian ruang dalam jangka panjang.

Dalam perspektif *Cities for People*, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa ruang publik yang berkualitas adalah ruang yang menempatkan manusia sebagai pusat perencanaan dan pengelolaan. Taman Film perlu diposisikan bukan sekadar sebagai objek

fisik atau taman tematik, melainkan sebagai infrastruktur sosial kota yang menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk berjalan, berhenti, berinteraksi, berekreasi, dan membangun keterikatan dengan tempat. Oleh karena itu, kualitas ruang perlu diarahkan pada prinsip *people-oriented*, yaitu ruang yang mudah diakses, nyaman, aman, aktif, inklusif, adaptif, dan mampu mendukung interaksi sosial.

Secara keilmuan, penelitian ini menghasilkan pemahaman bahwa terdapat keterkaitan antara kualitas ruang dan kualitas pengelolaan dalam membentuk keberhasilan ruang publik. Ruang yang secara fisik telah direvitalisasi dapat kehilangan fungsi sosialnya apabila tidak didukung oleh proses pengelolaan yang adaptif dan kolaboratif. Dengan demikian, pengembangan *public space quality* pada konteks kota tidak cukup menggunakan indikator fisik sebagai ukuran keberhasilan, tetapi perlu mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan masyarakat, kapasitas kelembagaan, keberlanjutan pengelolaan, keberagaman aktivitas, dan kemampuan ruang beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna.

Berdasarkan temuan tersebut, peningkatan kualitas Taman Film perlu diarahkan pada transformasi dari “ruang yang dibangun” menjadi “ruang yang dihidupkan” (*from built space to lived space*) melalui perencanaan berbasis kebutuhan pengguna, penguatan kelembagaan dan pembiayaan, pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan, peningkatan aksesibilitas pejalan kaki, pengaktifan kembali atau redefinisi fungsi tematik, serta pelibatan komunitas dalam pengelolaan dan penyelenggaraan aktivitas. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjadikan Taman Film sebagai ruang publik yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada manusia, sekaligus memperkuat penerapan prinsip *Cities for People* dalam pengembangan ruang publik perkotaan di Kota Bandung

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung, khususnya Bidang Pertamanan, atas data dan wawancara mengenai pengelolaan Taman Film. Terima kasih juga disampaikan kepada SHAU Architecture & Urbanism atas akses ke dokumen konsep perancangan, serta kepada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung atas data pembiayaan CSR. Penghargaan penulis sampaikan pula kepada warga dan pengguna Taman Film di Kelurahan Tamansari yang berbagi informasi selama observasi lapangan, dan kepada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Pradita atas dukungan pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alanshori, M. Z., Maulidi, A., Zahidi, S., Kusaeri, K., & Suparto, S. (2025). The Application of the CIPP Evaluation Model in Educational Programs in Indonesia. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 7(2), 103–122. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v7i2.7390>
- Bentley, I. (2011). *Responsive environments: a manual for designers*. Architectural Press/ Elsevier.
- Caesandra, V., Wiranegara, H. W., & Sugihartoyo, S. (2020). Tingkat Keberlanjutan Pemanfaatan Ruang Publik Multifungsi di Permukiman Kumuh. *TATALOKA*, 22(3), 354–365. <https://doi.org/10.14710/tataloka.22.3.354-365>
- Carmona, Matthew., Heath, Tim., Oc, T., & Tiesdell, S. (2003). *Public Space Urban Space. The Dimension of Urban Design*. Architectural Press.
- Chairunnisa, M. V., Purnamasari, W. D., & Parlindungan, J. (2023). Keberhasilan Taman Kelurahan Sebagai Ruang Publik di Kota Depok. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 19(2), 223–236. <https://doi.org/10.14710/pwk.v19i2.42284>
- Das, S., Moon, F., Dey, G., Das, M., & Paul, R. (2026). A GIS-Based Assessment of Attributes Affecting Publicness of Urban Open Spaces. *Journal of Architectural/Planning Research and Studies*, 23(1). <https://doi.org/10.56261/jars.v23.273041>
- Gehl, J. (2011). *Life Between Buildings: Using Public Space*. Princeton University Press.
- Gehl, J. (2010). *Cities for People*. London: London.
- Himawan, A. R. (2023). *Kualitas Taman Film Kota Bandung Berdasarkan Perspektif Komunitas Sineas di Kota Bandung* [Universitas Pendidikan Indonesia]. https://repository.upi.edu/96594/1/S_FTV_1904541_Title.pdf

- Ihsanti, D. A., & Sugiyantoro, S. (2024). Placemaking di Kolong Jalan Layang: Fenomena Penggunaan "Lost Space" untuk Taman Kota. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 20(4), 474-488. <https://doi.org/10.14710/pwk.v20i4.65149>
- Jian, I. Y., Luo, J., & Chan, E. H. W. (2020). Spatial Justice in Public Open Space Planning: Accessibility and Inclusivity. *Habitat International*, 97, 102122. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2020.102122>
- Lefebvre, H. (2009). *State, Space, World*. Minneapolis, MN: University of Minnesota.
- Hantono, D., & Ariantantrie, N. (2018). Kajian Ruang Publik Dan Isu Yang Berkembang Di Dalamnya. *Vitruvian*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.22441/vitruvian.2018.v8i1.005>
- Heinzelmann, F., & Suryawinata, D. (2020). Taman Film: Inspiring a sense of belonging. In STIPO, Urban Discovery, & Think City (Eds.), *The city at eye level Asia* (pp. 34–39). STIPO Publishing.
- Hermawansyah, H., Ibrahim, M., & Rasyid, M. (2024). Evaluasi Manajemen Mutu Program Studi PGMI di STIT Sunan Giri Bima dengan Model CIPP. *FASHLUNA*, 5(2), 105-116. <https://doi.org/https://doi.org/10.47625/fashluna.v5i2.821>
- Manurung, C. K., & Yusuf, M. (2025). Evaluasi Model CIPP Implementasi Kebijakan Transit Oriented Development di Kawasan Blok M – Sisingamangaraja. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 199–217. <https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.199-217.2025>
- Manurung, P. (2018). *Kota untuk semua: Ide penataan kota yang komprehensif*. ANDI.
- Margono, R. B., & Zuraida, S. (2019). Public Space as an Urban Acupuncture: Learning from Bandung, Indonesia. *JOURNAL OF APPLIED SCIENCE (JAPPS)*, 1(1), 022–033. <https://doi.org/10.36870/japps.v1i1.5>
- Pakpahan, R. T. (2024). Evaluating Implementation of E-Government Public Services in DKI Jakarta Towards A Smart City Using the CIPP and Kirkpatrick Evaluation Model. *Moestopo International Review on Social, Humanities, and Sciences*, 4(1), 88–99. <https://doi.org/10.32509/mirshus.v4i1.86>
- Pemerintah Kota Bandung. (2024). *Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung 2024-2045*.
- Peng, X., & Yin, X. (2025). Parks and People: Spatial and Social Equity Inquiry in Shanghai, China. *Sustainability (Switzerland)*, 17(12). <https://doi.org/10.3390/su17125495>
- Qi, J., Mazumdar, S., & Vasconcelos, A. C. (2024). Understanding the Relationship between Urban Public Space and Social Cohesion: A Systematic Review. *International Journal of Community Well-Being*, 7(2), 155–212. <https://doi.org/10.1007/s42413-024-00204-5>
- SHAU Architecture & Urbanism, D. P. dan K. P. K. B. (2014). *TAMAN FILM Fluid and spontaneous space for Bandung*.
- Soltip, M. F., Ramadhani, A., & Luru, M. N. (2023). Alternative Locations of Older People-Friendly City Park in Bandung City, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1263(1), 012019. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1263/1/012019>
- Steiner, F., & Butler, K. (2007). *Planning and Urban Design Standards (Student Edition)*. John Wiley & Sons, Inc.
- Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability*. Guilford Publications.
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. (2014). *Evaluation Theory, Models, and Applications*. John Wiley & Sons.
- Wang, J., Jiang, H., Wang, M., Xiong, Y., Zhu, A., & Wang, F. (2025). Assessment of Spatial Equality and Social Justice of Urban Park Distribution from Park Category Perspective: Evidence from Shanghai, China. *Sustainability (Switzerland)*, 17(12). <https://doi.org/10.3390/su17125474>
- Zong, M., Yanai, S., & Wang, R. (2025). Exploring the Use and Perceptions of Community Parks with Engagement Activities: A Case Study of Tokyo, Japan. *Frontiers in Sustainable Cities*, 7. <https://doi.org/10.3389/frsc.2025.1599193>